



PANDUAN

SATU DATA MIGRASI INTERNASIONAL (SDMI)

**“KONSEP DAN DEFINISI TERKAIT STATISTIK
MIGRASI INTERNASIONAL DAN STATISTIK
MIGRASI TENAGA KERJA INTERNASIONAL”**



**Spotlight
Initiative**
To eliminate violence
against women and girls



Daftar Isi

1. LATAR BELAKANG DAN KONTEKS	5
2. KONSEP DASAR MIGRASI INTERNASIONAL	7
2.1 KONSEP PENDUDUK (<i>USUAL RESIDENT</i>)	7
2.2 NEGARA TEMPAT TINGGAL	9
2.3 NEGARA KELAHIRAN	9
2.4 NEGARA TUJUAN	9
2.5 KEWARGANEGARAAN	10
3. TINJAUAN SUMBER DATA	11
3.1 KETERSEDIAAN DATA	11
3.2 PEMETAAN SUMBER DATA	11
4. STANDAR DATA DAN METADATA STATISTIK	15
4.1 STANDAR DATA STATISTIK	15
4.2 METADATA STATISTIK	19
5. STOK, ARUS MIGRASI, DAN CAKUPAN MIGRASI INTERNASIONAL LAINNYA	29
5.1 STOK MIGRAN INTERNASIONAL	29
5.2 ARUS MIGRASI INTERNASIONAL	30
5.3 CAKUPAN MIGRASI INTERNASIONAL LAINNYA	32
6. STATISTIK MIGRASI TENAGA KERJA INTERNASIONAL (<i>INTERNATIONAL LABOUR MIGRANT STATISTICS</i>)	35
6.1 STATUS ANGKATAN KERJA	36
6.2 PEKERJA	36
6.3 PENGANGGURAN	37
6.4 STATUS PEKERJAAN	38
6.5 KEGIATAN EKONOMI	38
6.6 JABATAN	39
6.7 GAJI/UPAH/PENGHASILAN	40
7. PEMILAHAN DATA	41
7.1 USIA	41
7.2 JENIS KELAMIN	41

7.3 PENDIDIKAN	42
7.4 WILAYAH	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	45

1. Latar Belakang dan Konteks

Sebagai salah satu negara pengirim migran internasional terbesar di Asia Tenggara, ketersediaan data yang valid dan akurat tentang migrasi internasional merupakan komponen krusial. Data mengenai migrasi internasional yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan merupakan kebutuhan agar pemerintah dapat mengambil kebijakan secara tepat dalam menghadapi berbagai permasalahan terkait migrasi internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, sebagai instansi pembina statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan sejumlah kementerian/lembaga yang menghasilkan data migrasi internasional atau yang berkepentingan terhadap tersedianya data migrasi internasional, berkolaborasi membangun Satu Data Migrasi Internasional (SDMI).

Tujuan inisiatif SDMI adalah untuk menyediakan data migrasi dalam menghasilkan data yang akurat, terkini, terpadu, akuntabel, mudah diakses, dan dapat dioperasikan di seluruh lembaga pemerintah, yang akan mendukung tata Kelola migrasi internasional di Indonesia. Data yang dihasilkan akan disajikan dalam suatu portal dan dilengkapi dengan data dan metadata standar, dapat diperbarui secara berkala, dan mudah diakses. Namun, saat ini masih terdapat beberapa tantangan terkait penyediaan data dari berbagai produsen data, meliputi: i) data yang tidak standar; ii) kode rujukan yang berbeda; iii) metadata tidak lengkap; iv) perbedaan data; v) kesulitan dalam mengakses data; dan vi), produksi data belum berorientasi pada pengguna.

SDMI merupakan sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola data migrasi internasional dan berkontribusi pada kebijakan migrasi berbasis bukti. Inisiatif SDMI didasari oleh Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; didukung oleh berbagai organisasi internasional, meliputi *International Labour Organisation* (ILO), *International Organisation for Migration* (IOM), dan *United Nations Population Fund* (UNFPA); dan bekerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia yang relevan. SDMI juga merupakan respon terhadap UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran dan rancangan Rencana Aksi Kesepakatan Global untuk Migrasi aman, tertib, dan teratur.

SDMI diharapkan akan mencakup data dari semua bentuk migrasi, termasuk migrasi tenaga kerja atau *International Labour Migrant Statistics* (ILMS) yang telah lebih dahulu dikembangkan oleh ILO. ILMS mengumpulkan informasi dari survei dan catatan administrasi relevan yang dihasilkan di sepuluh Negara Anggota ASEAN (Brunei, Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam). Basis data ILMS di ASEAN mengisi kesenjangan pengetahuan yang penting bagi pembuat kebijakan nasional dan regional dan untuk komunitas penelitian yang lebih luas.

ILO memberikan dukungan terhadap SDMI melalui penyusunan panduan SDMI terkait konsep dan definisi statistik migrasi tenaga kerja internasional melalui program "*Safe and Fair: Realizing Women Migrant Workers' Rights and Opportunities in the ASEAN Region*" (selanjutnya disebut *Safe and Fair*). Program ini merupakan program regional lima tahun (2018-2022), bagian dari *Spotlight Initiative* Uni Eropa-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)



untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. *Safe and Fair* dilaksanakan di sepuluh negara ASEAN melalui kemitraan antara ILO dan Badan PBB untuk Kestaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women), bekerjasama dengan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC).

ILO, melalui Program *Safe and Fair*, berupaya memperkuat pengumpulan, pengelolaan dan pelaporan data migrasi tenaga kerja terpilah menurut jenis kelamin, sehingga membuat perempuan dan gender lebih diperhatikan dalam statistik migrasi tenaga kerja. Upaya ini melibatkan penguatan pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin, menghasilkan statistik pekerja migran perempuan, meningkatkan analisis gender, dan melaporkan migrasi tenaga kerja baik di tingkat nasional maupun internasional. Basis data ILMS di ASEAN menyajikan informasi tentang pekerja migran internasional di sepuluh Negara Anggota ASEAN dari berbagai sumber. Guna mengelola dan memahami tren migrasi tenaga kerja internasional secara lebih koheren, basis data ILMS di ASEAN mengkonsolidasikan data yang relevan dan dapat dibandingkan, termasuk dari sumber yang tidak dipublikasikan. Melalui inisiatif SDMI, membuka peluang adanya kementerian/lembaga baru yang memiliki data tentang migrasi tenaga kerja yang dapat melengkapi basis data ILMS ASEAN. Pada saat yang sama, ada potensi untuk memanfaatkan proses yang ada pada ILMS untuk melengkapi data SDMI.

Di bawah inisiatif SDMI, BPS bekerja dengan berbagai kementerian untuk berupaya mendapatkan lebih banyak informasi terkait migrasi, termasuk data migrasi tenaga kerja. Pada saat yang sama, terdapat potensi untuk memanfaatkan proses yang telah dilakukan pada basis data ILMS ASEAN kemungkinan untuk menghubungkan data dari basis data ILMS ASEAN ke platform SDMI, dan menerapkan proses pengumpulan dan kendali mutu data dalam mengisi kesenjangan data, baik untuk basis data ILMS ASEAN maupun platform SDMI. Referensi ILMS dalam panduan ini didasarkan dari panduan ILMS (ILO, 2021).

Panduan ini disusun sebagai berikut: Bagian 1 berisi latar belakang dan konteks pembuatan panduan ini; Bagian 2 berisi garis besar konsep dan definisi penduduk, negara asal dan tujuan, kewarganegaraan, tempat kelahiran; Bagian 3 berisi konsep dan definisi untuk stok, arus masuk dan arus keluar migran internasional, dan indikator migrasi internasional lainnya; Bagian 4 mencakup konsep ILMS atau statistik migrasi tenaga kerja internasional; Bagian 5 mencakup variabel disagregasi seperti, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan wilayah; dan Bagian 6 berisi tinjauan sumber data migrasi internasional di Indonesia.

2. Konsep Dasar Migrasi Internasional

Migran internasional adalah individu yang mengubah negara tempat tinggal tetapnya. Pengertian migran internasional juga dapat didefinisikan berdasarkan negara kelahiran atau negara kewarganegaraannya. Hal ini mencakup semua orang di suatu negara, dalam konteks ini adalah Indonesia, yang lahir di luar negeri (penduduk yang lahir di luar negeri) atau yang tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia (warga negara asing atau penduduk asing).

2.1 Konsep Penduduk (*Usual Resident*)

Penentuan konsep penduduk berdasarkan konsep *usual resident* ditentukan menurut tempat tinggal seseorang dimana ia biasa tinggal dan beristirahat. Dalam hal ini, yang termasuk penduduk di suatu negara berdasarkan *Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses* (UN, 2017) adalah:

1. Mereka yang tinggal menetap 1 (satu) tahun atau lebih di suatu wilayah;
2. Mereka yang tinggal kurang dari 1 (satu) tahun di suatu wilayah, tetapi bermaksud/berencana menetap selama minimal 1 (satu) tahun; dan
3. Mereka yang sedang bepergian ke wilayah lain kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak bermaksud menetap di wilayah tujuan.

Idealnya, setiap orang harus dapat didefinisikan sebagai penduduk hanya di satu wilayah saja. Namun, pada kenyataannya masih mungkin ditemukan bahwa seseorang tidak memenuhi kriteria lama tinggal baik di negara asal maupun di negara tujuan. Kondisi tersebut menyebabkan migran tidak tercatat atau dapat tercatat dua kali, sehingga jumlah migran perlu dilakukan penyesuaian dan harmonisasi untuk dapat digunakan di tingkat internasional. Penduduk juga mencakup migran tidak teratur atau tidak terdokumentasi, pencari suaka, dan pengungsi selama memenuhi minimal syarat tinggal untuk dapat dikatakan sebagai penduduk di suatu negara.

Penduduk sementara merujuk pada seluruh orang yang tinggal di suatu negara pada waktu tertentu namun bukan penduduk setempat (*de jure*). Pada umumnya, statistik resmi hanya mencatat penduduk setempat (*de jure*) atau penduduk sesuai keberadaannya (*de facto*) sehingga diperlukan keterkaitan dengan kerangka konseptual untuk dapat menghitung migrasi dan mobilitas internasional. Sebagian besar negara mengukur migrasi internasional berdasarkan konsep *de jure* dan *de facto*. Namun, beberapa negara menggunakan hasil sensus atau data administratif untuk menghitung jumlah penduduk untuk kedua konsep tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam menghitung jumlah penduduk, jumlah orang yang sedang bermigrasi keluar dan sementara tinggal di suatu wilayah.

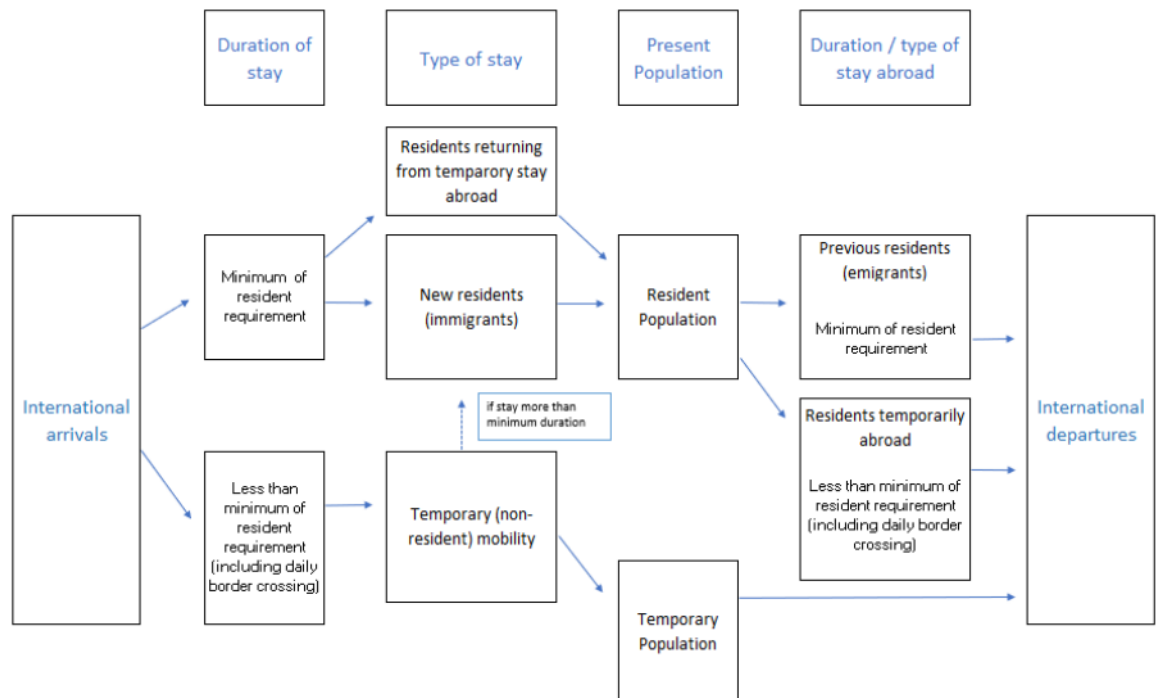


Referensi: UN Expert Group on Migration Statistics (2021)

Gambar 1. Kerangka Konseptual Mobilitas Internasional

Gambar 1 menunjukkan pengukuran mobilitas internasional termasuk arus masuk dan arus keluar migrasi internasional terhadap penduduk di suatu wilayah. Penduduk bertambah dari tahun t ke tahun $t+n$ dikarenakan penambahan migran masuk dan kelahiran serta pengurangan dari penduduk yang berangkat ke luar negeri dan kematian.

Gambar 2 menerangkan kerangka konseptual yang menghubungkan arus masuk migran internasional terhadap penduduk, mencakup seluruh orang yang tinggal di Indonesia pada suatu periode tertentu, tidak termasuk mereka yang sedang tinggal di luar negeri. Kata kunci pembeda antara migrasi internasional dan perpindahan penduduk lainnya adalah durasi tinggal di suatu negara. Definisi kriteria migran membutuhkan informasi lamanya tinggal untuk penentuan konsep penduduk. Dalam praktiknya, terdapat batasan lama tinggal seperti 6 bulan atau 12 bulan sehingga arus migrasi dapat dihitung secara tahunan. Kondisi yang sama berlaku juga untuk seseorang yang berangkat dan tinggal menetap di luar negeri berdasarkan syarat minimal lamanya tinggal di suatu negara. Seseorang yang tinggal di lebih dari satu negara selama kurang dari batas minimal durasi tinggal, tidak termasuk penduduk di negara-negara tersebut, namun masih termasuk sebagai penduduk di negara asalnya. Dalam kerangka tersebut, perubahan status menjadi penduduk akan terpenuhi jika seseorang tinggal memenuhi durasi minimum di negara tersebut. Orang yang tinggal lebih lama dari kriteria durasi minimum dan tidak memiliki visa yang sah dianggap sebagai bagian dari populasi penduduk.



Referensi: UN Expert Group on Migration Statistics (2021)

Gambar 2. Kerangka Konseptual Dan Keterkaitannya Antara Lama Tinggal dan Mobilitas Internasional

2.2 Negara Tempat Tinggal

Negara tempat tinggal seseorang adalah negara tempat orang tersebut memiliki tempat tinggal di mana dia biasanya menghabiskan waktu istirahatnya. Untuk tujuan pengumpulan data, negara mungkin memiliki definisi populasi penduduknya sendiri, misalnya berdasarkan durasi tinggal atau tujuan tinggal.

2.3 Negara Kelahiran

Variabel ini mengacu pada kriteria negara kelahiran untuk definisi migrasi internasional dan membedakan penduduk kelahiran asli Indonesia dengan penduduk kelahiran negara asing (*foreign-born*). Terdapat dua definisi yang digunakan dalam menjelaskan konsep tempat lahir. Pertama tempat lahir secara *de facto* yaitu tempat atau negara dimana seseorang dilahirkan. Kedua, penentuan tempat lahir dengan pendekatan tempat atau negara tempat tinggal ibu kandung pada saat melahirkan orang tersebut.

2.4 Negara Tujuan

Negara tujuan seorang emigran adalah negara, selain negara kewarganegaraannya, di mana seseorang memindahkan tempat tinggal tetapnya.

2.5 Kewarganegaraan

Variabel ini mengacu pada kriteria kewarganegaraan. Kewarganegaraan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang Indonesia asli dan keturunan asing yang mendapat kewarganegaraan Indonesia.
2. Warga Negara Asing (WNA) untuk konteks Indonesia adalah mereka yang mempunyai kewarganegaraan selain WNI atau mereka yang tanpa kewarganegaraan.

Dalam praktiknya, kewarganegaraan tidak harus sama dengan garis keturunan. Misalnya, penduduk keturunan Tionghoa (Cina) tetapi berkewarganegaraan Malaysia, maka kewarganegaraan yang dicatat adalah Malaysia. Untuk anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda karena orang tuanya memiliki kewarganegaraan berbeda, dalam sensus atau survei, biasanya dicatat salah satu kewarganegaraan berdasarkan informasi dari orangtua.

3. Tinjauan Sumber Data

Data migrasi internasional yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga memiliki nilai yang sangat penting dalam melengkapi dataset yang diperlukan guna mendukung pengembangan kebijakan yang didasarkan pada bukti konkret. Bagian ini menampilkan hasil identifikasi produsen data migrasi internasional yang tersedia di tingkat nasional. Perlu dicatat bahwa terdapat berbagai kementerian/lembaga yang secara aktif menghasilkan data-data migrasi internasional yang mungkin belum tercakup dalam bagian ini. Oleh karena itu, ada peluang untuk menambahkan produsen data lain yang menghasilkan data yang relevan dengan konteks migrasi internasional.

3.1 Ketersediaan Data

Sumber data migrasi internasional tersebar di beberapa kementerian/lembaga. Sepanjang yang telah teridentifikasi, kementerian/lembaga yang relevan terhadap isu migrasi internasional diantaranya adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan (KEMNAKER), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDESATA), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMHUKHAM) – Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMPPA), Kementerian Sosial Republik Indonesia (KEMENSOS), BANK INDONESIA (BI), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kementerian tersebut berperan dalam penyediaan data migrasi internasional dari sisi stok migran dan arus migran, baik arus masuk internasional maupun arus keluar internasional. Selain itu, beberapa kementerian lain juga berperan dalam penyediaan data tematik migrasi internasional, misalnya pengungsi, biaya rekrutmen, dan remitansi. Selain dari kementerian/lembaga, kontribusi dari organisasi internasional seperti UNHCR, IOM, dan ILO juga berperan besar terhadap penyediaan data migrasi internasional.

3.2 Pemetaan Sumber Data

Ulasan terkait pemetaan sumber data migrasi internasional menjadi bagian yang penting dalam melakukan identifikasi ketersediaan data dari berbagai kementerian/lembaga dihubungkan dengan konseptual dalam konteks migrasi internasional. Tabel berikut memetakan potensi data yang relevan dengan migrasi internasional.

Tabel 1. Tabel Potensi data dari Kementerian/Lembaga/Organisasi

Kementerian/Lembaga/organisasi	Potensi Data
Kementerian luar negeri	Data WNI di luar negeri (kedatangan, perpindahan, kepulangan, perlindungan)
Kementerian ketenagakerjaan	Data Tenaga Kerja Asing (TKA asing dan izin tenaga kerja yang diterbitkan)
BP2MI	Data pekerja migran indonesia (penempatan, pengaduan, dan kepulangan)
Kemenkumham	Data perlintasan dan data izin tinggal, serta data perolehan kewarganegaraan
Bank Indonesia	Data remitansi pekerja migran Indonesia dan remitansi tenaga kerja asing
Kemendesa PDTT	Jumlah perusahaan pengerahan TKI dan pekerja migran Indonesia ke luar negeri
Kementerian PPPA	Jumlah kasus TPPO di luar negeri
BPJS Ketenagakerjaan	Pekerja Migran Indonesia terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
Kemendagri	WNA pemegang izin tinggal, penduduk masuk, WNI yang memiliki NIT
KPU	Daftar pemilih tetap luar negeri dalam pemilu
Kemensos	Warga negara migran korban perdagangan orang dan rehabilitasi
BNPB	WNA korban bencana, operasi penyelamatan WNI korban bencana di luar negeri
ILO	ILMS
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (Kementerian Keuangan)	Data pelajar yang menerima beasiswa studi ke luar negeri
UNHCR dan IOM	Data pengungsi

Daftar data dan kementerian/lembaga pada tabel di atas dapat berkembang seiring dengan data yang semakin beragam yang diproduksi oleh kementerian/lembaga. Berbagai jenis data

yang dapat diperoleh sesuai tabel di atas akan menjadi lebih bermanfaat apabila dilengkapi dengan pemilahan daya seperti yang telah dijelaskan pada bagian 5 dalam panduan ini.

Pada bagian 3 dari panduan ini telah dijelaskan konsep dan definisi dari stok, arus, dan cakupan variabel lainnya (tematik) terkait migrasi internasional. Tabel di bawah ini merupakan hasil identifikasi dan pemetaan konsep, indikator, dan sumber data dari kementerian/lembaga

Tabel 2. Tabel Konsep, Indikator, dan Sumber Data Migrasi Internasional

Konsep	Indikator	Sumber data
Stok migran internasional	Jumlah penduduk (WNA) yang lahir di luar negeri	Dirjen Imigrasi dan Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah penduduk (WNA) yang lahir di dalam negeri	
	Jumlah penduduk (WNI) yang lahir di luar negeri	
	Jumlah penduduk (WNI) yang lahir di dalam negeri sebagai migran kembali	
Arus masuk internasional	Jumlah WNI yang datang dari luar negeri	Kementerian Luar Negeri
	Jumlah WNA yang masuk ke Indonesia	Dirjen Imigrasi
	Jumlah TKA di Indonesia berdasarkan penempatan	Kementerian Ketenagakerjaan
Arus keluar internasional	Jumlah WNA yang berangkat dari Indonesia	Dirjen Imigrasi
	Jumlah WNI yang berangkat ke luar negeri	
	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di luar negeri	BP2MI
	Jumlah kasus TPPO di luar negeri	KemenPPPA

Konsep	Indikator	Sumber data
Tematik	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar BPJS ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan
	Jumlah pemilih tetap di luar negeri	KPU
	Besaran Remitansi	Bank Indonesia
	Jumlah perusahaan pengerahan TKI	Kemendes PDTT
	Jumlah pengungsi	UNHCR dan IOM

4. Standar Data dan Metadata Statistik

4.1 Standar Data Statistik

Tata kelola Standar Data Statistik (SDS), khususnya yang berlaku lintas instansi, tertuang dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik. Berdasarkan peraturan tersebut, tahapan penyusunan standar data statistik dimulai dengan pengusulan SDS oleh Produsen Data, pemeriksaan (reviu) usulan SDS oleh Walidata, dan penetapan SDS oleh Pembina Data. Penyusunan dan pemeriksaan SDS dilakukan dengan memastikan kewajaran, kejelasan, dan konsistensi isian, tidak adanya duplikasi, serta memperhatikan manfaatnya. Dengan demikian, SDS yang ditetapkan memenuhi azas standarisasi dan layak diimplementasikan dalam pengumpulan data maupun penyajian data.

Standar Data Statistik (SDS) dapat dikatakan sebagai panduan dalam pengumpulan data dan penyajian data untuk menghasilkan data yang terstandar sesuai kebutuhan pengguna data. Oleh karena itu, SDS erat kaitannya dengan metadata statistik, karena komponen SDS menjadi bagian dari metadata statistik terutama ketika SDS benar-benar digunakan sebagai acuan dalam memproduksi data statistik. SDS disusun dengan mempertimbangan SDS yang telah ditetapkan oleh Pembina Data serta perkembangan kebutuhan data terkini.

Komponen Standar Data Statistik

Secara umum, SDS memiliki lima komponen, yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan.

1. Konsep, merupakan ide yang mendasari data. Konsep harus dapat menggambarkan keseluruhan maksud suatu data. Konsep dapat dituangkan ke dalam satu kata tunggal, gabungan beberapa kata (frasa) atau satu kalimat lengkap.
2. Definisi, merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data lain. Pendefinisian yang baik mampu memastikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan data yang ingin diperoleh serta memudahkan operasional di lapangan.
3. Klasifikasi, merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas. Pada prinsipnya, klasifikasi data harus dapat membagi semua unit dalam populasi ke dalam kelompok-kelompok atau kategori yang independen/tidak beririsan/saling lepas/*mutually exclusive*, dan tidak ada satu pun anggota populasi/elemen/aspek yang tidak tercakup dalam salah satu kelompok/kategori (lengkap, menyeluruh/*exhaustive*). Klasifikasi dapat dimanfaatkan menjadi disagregasi dalam penyajian data.
4. Ukuran, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar. Ukuran dalam SDS dapat berupa ukuran pengukuran (luas, massa, volume, dll) atau ukuran statistik (total, proporsi, rasio, dll).

5. Satuan, merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan (contoh: persen, orang, unit, meter persegi, meter kubik, dll).

Contoh Penyusunan Standar Data Statistik

- Dataset/Judul Tabel:
1. Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin
 2. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
 3. Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Wilayah, dan Jenis Kelamin
 4. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Klasifikasi Wilayah, Status Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin.
 5. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Klasifikasi Wilayah, dan Jenis Kelamin

Jenis data statistik tersebut adalah data numerik, yang disajikan menurut beberapa kelompok atau kategori. Sehingga data statistik yang disusun adalah SDS untuk data statistik dengan jenis numerik, dan data kategorik yang berisi kategori-kategori untuk mengelompokkan data statistik. Penyusunan SDS kelima data tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. Standar Data Statistik dengan Tipe Data Numerik

Nama Data	Jumlah Penduduk
Definisi	Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
Konsep	Penduduk
Ukuran	Total
Satuan	orang
Subjek	1.1 Kependudukan dan Migrasi
Manfaat	Dasar perencanaan pembangunan
Interpretasi	Menggambarkan banyaknya penduduk yang berada dalam suatu wilayah.
Level Terkecil Tersedianya Data	Kabupaten/Kota
Mekanisme Penghitungan Indikator	<i>Tuliskan rumus yang digunakan untuk menghasilkan data tersebut agar produsen data lain dapat memahami dan dapat memproduksi data dengan cara serupa (misal produsen data sensus menghitung dengan cara count, sedangkan jika produsen data survei akan memproduksi data tersebut dapat dengan cara count tertimbang, atau menjumlahkan (sum) hasil registrasi data.</i>
Rumus	$P = \sum_{j=1}^N p_j$
Keterangan Rumus	P = Jumlah penduduk $p_j = 1$, jika individu memenuhi syarat sebagai penduduk $j = 1, \dots, N$
Klasifikasi Penyajian/Disagregasi Indikator	Wilayah; Klasifikasi Wilayah;

	Jenis Kelamin; Umur/Usia; Status Kewarganegaraan;
Referensi	Kementerian PPN/Bappenas, Metadata Indikator Edisi II: Pilar Pembangunan Lingkungan, Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs); https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1152 ; United Nations Recommendation 2017; Population and Housing Census 2020

Tabel 4. Standar Data Statistik Kategori

Nama Data	Wilayah	Klasifikasi Wilayah	Jenis Kelamin	Umur/Usia	Status Kewarganegaraan
Definisi	Letak geografis yang mengacu pada sistem pengkodean wilayah kerja statistik.	Golongan suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang ditentukan berdasarkan standar atau ciri wilayah perkotaan dan perdesaan.	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. Dalam pengumpulan data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, sedangkan untuk penyajian data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, kelompok umur 5 tahunan, kelompok umur 10 tahunan, dan/atau kelompok umur dependensi.	Kedudukan seorang warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Konsep	Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik	Perkotaan; Perdesaan	Jenis Kelamin	Umur/Usia	Kewarganegaraan
Unit Observasi	<i>Sesuai dengan pengisian di Metadata</i>	<i>Sesuai dengan pengisian di Metadata</i>	<i>Sesuai dengan pengisian di Metadata</i>	<i>Sesuai dengan pengisian di Metadata</i>	<i>Sesuai dengan pengisian di Metadata</i>

Nama Data		Wilayah	Klasifikasi Wilayah	Jenis Kelamin	Umur/Usia	Status Kewarganegaraan
Subjek		3.2 Statistik Regional dan Small Area Statistik	3.2 Statistik Regional dan Small Area Statistik	3.3.2 Gender dan kelompok Populasi Khusus	1.1 Kependudukan dan Migrasi	1.1 Kependudukan dan Migrasi
Klasifikasi Isian	Jenis Value Domain	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
	Daftar item value domain	Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik	1. Perkotaan 2. Perdesaan	1. Laki-laki 2. Perempuan	1. 0-4 Tahun 1.1. 0 Tahun 1.2. 1 Tahun 1.3. 2 Tahun 1.4. 3 Tahun 1.5. 4 Tahun 2. 5-9 Tahun 2.1. 5 Tahun 2.2. 6 Tahun 2.3. 7 Tahun 2.4. 8 Tahun 2.5. 9 Tahun x.y. dst.	1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Warga Negara Asing (WNA)
Aturan Validasi		Sesuai dengan pengisian di Metadata	Sesuai dengan pengisian di Metadata	Sesuai dengan pengisian di Metadata	Sesuai dengan pengisian di Metadata	Sesuai dengan pengisian di Metadata
Referensi		https://sig.bps.go.id/home/sistempengkodean	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020	Kondef Operasional Baku Statistik Sosial (2018)	https://dinkes.kalbarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Laporan-Riskesdas-2018-Nasional.pdf ; https://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf ; https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html ; https://www.abs.gov.au/statistics/standards/age-standard/2014-version-17	UU No 12 Tahun 2006; UU Nomor 24 Tahun 2013

Tabel 5. Konsep dan Definisi Baku Statistik

Konsep	Definisi	Referensi
Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Rancangan pengumpulan data/metodologi
Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik	Identitas wilayah kerja statistik yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan blok sensus. Kode dan nama wilayah kerja statistik ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Wilayah Kerja Statistik yang Terbit Setiap Tahun	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Wilayah Kerja Statistik yang Terbit Setiap Tahun
Perkotaan	Status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi desa perkotaan.	Peraturan Kepala BPS Nomor 120 Tahun 2020
Perdesaan	Status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi desa perdesaan.	Peraturan Kepala BPS Nomor 120 Tahun 2020
Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	Kondef Operasional Baku Statistik Sosial (2018)
Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Kondef Operasional Baku - Statistik Sosial (2018); United Nations Recommendation 2017; Population and Housing Census 2020

4.2 Metadata Statistik

Salah satu prinsip dalam Satu Data Indonesia yang disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia adalah “Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata”. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata dapat disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.

Metadata memberikan beragam manfaat bagi penyelenggara Satu Data Indonesia, antara lain:

- Bagi pembina data, metadata menjadi salah satu indikator dalam mengukur kematangan penyelenggaraan statistik dan arah strategi pembinaan statistik.
- Bagi produsen data, metadata dapat berfungsi untuk menghindari duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta meningkatkan nilai organisasi tentang tata kelola informasi.

- Bagi walidata, metadata dapat memudahkan dalam melakukan interpretasi data, pengelolaan data, dokumentasi, serta pengendalian mutu penyelenggaraan kegiatan statistik.
- Bagi pengguna data, metadata memberikan kemudahan dalam melakukan interpretasi data, ketepatan dalam perumusan kesimpulan, serta memudahkan dalam pencarian data.

Komponen Metadata

Metadata memiliki struktur yang berbeda-beda tergantung data yang akan dideskripsikan. Terkait metadata untuk data statistik, struktur dan format baku serta contoh pengisian metadata statistik dijelaskan dalam Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Metadata statistik terbagi menjadi tiga jenis yaitu metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator.

Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik. Struktur baku metadata kegiatan statistik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik

No.	Struktur	No.	Struktur
1	Nama kegiatan statistik	6	Rancangan pengumpulan data/metodologi
2	Identifikasi penyelenggara	7	Rancangan pengolahan data
3	Tujuan pelaksanaan	8	Level estimasi
4	Periode pelaksanaan	9	Analisis
5	Cakupan wilayah	10	Rancangan diseminasi

Metadata variabel adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik. Struktur baku metadata variabel statistik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Struktur Baku Metadata Variabel Statistik

No.	Struktur	No.	Struktur
1	Kode kegiatan	7	Referensi waktu
2	Nama variabel	8	Tipe Data
3	Alias	9	Klasifikasi Isian
4	Konsep	10	Kalimat Pertanyaan
5	Definisi	11	Status Aksesibilitas Publik
6	Referensi Pemilihan		

Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat suatu indikator. Struktur baku metadata indikator statistik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Struktur Baku Metadata Indikator Statistik

No.	Struktur	No.	Struktur
1	Nama Indikator	8	Klasifikasi
2	Konsep	9	Publikasi ketersediaan indikator pembangun
3	Definisi	10	Nama indikator pembangun
4	Interpretasi	11	Kode kegiatan penghasil variabel pembangun
5	Metode/rumus penghitungan	12	Nama variabel pembangun
6	Ukuran	13	Level estimasi
7	Satuan	14	Status aksesibilitas publik

Contoh Penyusunan Metadata

Tabel 9. Contoh Metadata Statistik kegiatan

Judul Kegiatan		Kompilasi Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Tahun		2023
Jenis Statistik		Statistik Sektoral
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan		Ketenagakerjaan
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan 21urvey21ic dari BPS?		Tidak
Identitas Rekomendasi:		-
I. Penyelenggara		
1.1	Instansi Penyelenggara	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
1.2	Alamat	Jalan Mt. Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
1.3	Telepon	(021) 29244800
1.4	Faksimile	(021) 29244810
1.5	Email	Halotki@bp2mi.go.id
II. Penanggung Jawab		
2.1	Unit Eselon Penanggung Jawab	
	Eselon 1	Sekretaris Utama
	Eselon 2	Pusat Data dan Informasi

2.2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)	
	Nama	Mahliana Z
	Jabatan	Statistisi Ahli Muda
	Alamat	Jalan Mt Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
	Telepon	021 7900764
	Faksimile	0217900764
	Email	Ses.pusdatin@bp2mi.go.id
III. Perencanaan dan Persiapan		
3.1	Latar belakang	Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, data merupakan komponen yang sangat penting dalam penyajian informasi. Informasi tidak akan bisa tersampaikan jika tidak didukung dengan adanya data. Begitu pula informasi tidak akan valid atau benar jika data yang ditampilkan tidak akurat bahkan salah. Untuk mendukung penyampaian informasi terkait penempatan pekerja migran Indonesia dan perlindungan pekerja migran Indonesia diperlukan suatu mekanisme pelaporan data yang mengacu kepada pola cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu pelaporan terkait data-data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang sifatnya rutin (<i>continue</i>) baik itu bersifat bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Mekanisme pelaporan data-data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia didasarkan kepada pencatatan data-data operasional yang diolah berdasarkan 22urvey informasi (22urvey komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia/ SISKOP2MI, <i>Crisis Center</i>) yang direkap berdasarkan bulanan, dan tahunan.
3.2	Tujuan Kegiatan	Penyajian data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dirilis bulanan oleh pusat data dan informasi yang menyajikan beragam jenis data bersumber dari 22urvey pengolahan data BP2MI. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang disajikan dalam bentuk 22urve dan juga infografis dengan tujuan untuk menginformasikan data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara transparan kepada masyarakat umum sehingga dapat bermanfaat dan dipergunakan untuk berbagai keperluan.
3.3	Rencana Jadwal Kegiatan	
	A. Perencanaan	
	1. Perencanaan Kegiatan	25 Desember 2022 s/d 29 Desember 2022
	2. Desain	27 Desember 2022 s/d 29 Desember 2022
	B. Pengumpulan	

	3. Pengumpulan Data	29 Desember 2022 s/d 31 Desember 2023		
	C. Pemeriksaan			
	4. Pengolahan Data	01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023		
	D. Penyebarluasan			
	5. Analisis Data	01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023		
	6. Diseminasi Hasil	01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023		
	7. Evaluasi	16 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023		
3.4 Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
1	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	Saat pelaporan
2	Sektor Penempatan	Sektor	Penempatan berdasarkan pengguna (Perorangan atau Lembaga Berbadan Hukum)	Saat pelaporan
3	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Jenjang Pendidikan	Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).	Saat pelaporan
4	Negara	Negara	Nama negara atau wilayah beserta kode numerik tiga digit yang digunakan untuk keperluan pemrosesan 23urvey23ic oleh Divisi Statistik Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kode alfabet tiga digit yang ditetapkan oleh International <i>Organization for Standardization</i> (ISO).	Saat pelaporan
5	Skema Penempatan	Skema	Jenis penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan pelaksana penempatan.	Saat pelaporan
6	Media Pengaduan	Media Pengaduan	Sarana yang digunakan untuk mengadukan permasalahan terkait Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia baik sebelum, selama, dan setelah bekerja.	Saat pelaporan

7	Status Pengaduan	Status Pengaduan	Tahap atau kedudukan pengaduan Pekerja Migran Indonesia dalam proses penanganan pengaduan.	Saat pelaporan
8	Kategori Kasus	Kategori Kasus	Klasifikasi permasalahan yang diajukan oleh Pekerja Migran Indonesia berdasarkan topik.	Saat pelaporan
9	Kawasan	Kawasan	Kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di 3 Kawasan	Saat pelaporan

IV. Desain Kegiatan

4.1	Kegiatan ini dilakukan	Berulang
4.2	Frekuensi Penyelenggaraan	Tahunan
4.3	Tipe Pengumpulan Data	Longitudinal Panel
4.4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	Seluruh Wilayah Indonesia
4.6	Metode Pengumpulan Data	• Pengumpulan Data Sekunder • Lainnya : Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI)
4.7	Sarana Pengumpulan Data	Computer Aided Web Interviewing (CAWI)
4.8	Unit Pengumpulan Data	Individu

V. Desain Sampel (*blok ini hanya diisi pada kegiatan dengan cara pengumpulan data berupa 24urvey*)

5.1	Jenis Rancangan Sampel	
5.2	Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir	
5.3	Metode Sampel Probabilitas yang Digunakan	
5.4	Kerangka Sampel Tahap Terakhir	
5.5	Fraksi Sampel Keseluruhan	
5.6	Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama	
5.7	Unit Sampel	
5.8	Unit Observasi	

VI. Pengumpulan Data

6.1	Apakah Melakukan Uji Coba (<i>Pilot Survey</i>)?	Tidak
6.2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Supervisi
6.3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak
6.4	Petugas Pengumpulan Data	(<i>hanya diisi jika rincian 4.7 sarana pengumpulan data berupa PAPI, CAPI, CATI</i>)

6.5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	(hanya diisi jika rincian 4.7 sarana pengumpulan data berupa PAPI, CAPI, CATI)
6.6	Jumlah Petugas	
	Supervisor/penyelia/pengawas	(hanya diisi jika rincian 4.7 sarana pengumpulan data berupa PAPI, CAPI, CATI)
	Pengumpul data/enumerator	(hanya diisi jika rincian 4.7 sarana pengumpulan data berupa PAPI, CAPI, CATI)
6.7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	(hanya diisi jika rincian 4.7 sarana pengumpulan data berupa PAPI, CAPI, CATI)
VII. Pengolahan dan Analisis		
7.1	Tahapan Pengolahan Data	
	Penyuntingan (<i>Editing</i>)	Ya
	Penyandian (<i>Coding</i>)	Tidak
	<i>Data Entry</i>	Tidak
	Penyahihan (Validasi)	Ya
7.2	Metode Analisis	Deskriptif
7.3	Unit Analisis	Individu
7.4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	- Nasional - Provinsi - Kabupaten/Kota
VIII. Diseminasi Hasil		
8.1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum	
	Tercetak (<i>Hardcopy</i>)	Ya
	Digital (<i>Softcopy</i>)	Ya
	Data mikro	Tidak
8.2	Rencana Rilis Produk Kegiatan	
	Tercetak (<i>Hardcopy</i>)	12 Januari 2023 12 Februari 2023 12 Maret 2023 12 April 2023 12 Mei 2023 12 Juni 2023 12 Juli 2023 12 Agustus 2023 12 September 2023 12 Oktober 2023 12 November 2023 12 Desember 2023
	Digital (<i>Softcopy</i>)	05 Januari 2023 05 Februari 2023 05 Maret 2023 05 April 2023 05 Mei 2023

		• 05 Juni 2023 • 05 Juli 2023 • 05 Agustus 2023 • 05 September 2023 • 05 Oktober 2023 • 05 November 2023 • 05 Desember 2023
	Data mikro	-

Tabel 10. Contoh Metadata Statistik Indikator

Nama indikator	Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Konsep	Pekerja Migran Indonesia
Definisi	Jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang sedang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
Interpretasi	Semakin besar 26ndicator semakin besar jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan.
Metode/Rumus Penghitungan	Agregat dari Jumlah E-Pekerja Migran Indonesia
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Klasifikasi Penyajian	• Negara Penempatan • Jenis Kelamin • Sektor Penempatan • Pendidikan • Wilayah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) • Jabatan • Skema Penempatan • Kawasan
Apakah Indikator Komposit?	
Tidak	
Nama Indikator Pembangun	Publikasi Ketersediaan
- (hanya diisi apabila 26ndicator ini merupakan 26ndicator komposit)	- (hanya diisi apabila 26ndicator ini merupakan 26ndicator komposit)
Nama Variabel Pembangun	Kegiatan Penghasil
Negara	Kompilasi Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Jenis Kelamin	Kompilasi Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Sektor Penempatan	Kompilasi Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Kompilasi Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Jabatan	Kompilasi Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Skema Penempatan	Kompilasi Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Kawasan	Kompilasi Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Dapat Diakses Umum	Ya

Tabel 11. Contoh Metadata Statistik Variabel

Nama variabel	Skema Penempatan	
Alias	SP	
Konsep	Skema	
Definisi	Jenis penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan pelaksana penempatan.	
Referensi pemilihan	Undang-undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	
Referensi waktu	Saat pelaporan	
Tipe Data	Karakter	
Klasifikasi Isian	Kode item klasifikasi	Nama item klasifikasi
	1	<i>P to P (Private to Private)</i>
	2	<i>G to G (Government to Government)</i>
	3	Perseorangan (mandiri)
	4	Perpanjangan perjanjian kinerja
	5	UKPS (Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri)
	6	Perpanjangan perjanjian kerja di luar negeri
Aturan Validasi	Wajib diisi	
Kalimat Pertanyaan	Skema Penempatan Pekerja Migran Indonesia	
Dapat Diakses Umum	Ya	

5. Stok, Arus Migrasi, dan Cakupan Migrasi Internasional lainnya

Terdapat dua konsep luas yang digunakan dalam migrasi internasional, yaitu stok dan arus.

Memahami perbedaan antara stok dan arus

Analogi yang dapat digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara stok dan arus adalah dengan menggambarkan stok migran internasional (baik stok migran di suatu negara maupun stok warga negara di luar negeri) sebagai saldo bank yang ada di suatu negara dan saldo bank yang ada di seluruh bagian lain dunia. Arus masuk dan arus keluar dapat diibaratkan sebagai uang yang disetor ke rekening bank dan uang yang ditarik dari rekening tersebut.

Sumber: Diadaptasi dari: ILO (2022)

5.1 Stok Migran Internasional

Beberapa komponen berikut digunakan untuk penentuan stok migran, yaitu: migran yang lahir di luar negeri (*foreign-born*), yang lahir di dalam negeri (*native-born*), penduduk WNA (*foreign citizen*), dan penduduk WNI. Penjelasan terkait empat variabel tersebut adalah sebagai berikut:

- Penduduk yang lahir di luar negeri (*foreign-born*) merupakan seluruh penduduk yang tinggal menetap di Indonesia pada suatu periode waktu tertentu dan lahir di luar negeri.
- Penduduk asli (*native-born*) adalah seluruh penduduk yang tinggal menetap di Indonesia pada suatu periode tertentu dan lahir di Indonesia.
- Penduduk WNA (*foreign citizen*) mencakup seluruh penduduk yang tinggal menetap di Indonesia pada suatu periode waktu tertentu dan tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia, termasuk mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*).
- Penduduk WNI mencakup seluruh penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah Indonesia pada waktu periode tertentu memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Adapun pembagian kategori dari keempat variabel tersebut dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 12. Klasifikasi Status Migran Internasional Menurut Kewarganegaraan dan Tempat Lahir

Variabel	lahir di luar negeri (<i>foreign-born</i>)	lahir di dalam negeri (<i>native-born</i>)
WNA	Stok migran internasional	Stok migran internasional
WNI	Stok migran internasional	Tidak termasuk stok migran



Selain definisi stok migran yang dijelaskan di atas, untuk WNI yang lahir di Indonesia (*native-born*) dapat masuk dalam kategori migrasi internasional seperti berikut:

- **Stok warga negara Indonesia di luar negeri** merujuk pada jumlah warga negara Indonesia yang merupakan penduduk di negara lain pada suatu periode tertentu.
- **Migran kembali** merujuk pada seseorang atau penduduk asli yang sebelumnya tinggal dan bermigrasi ke luar negeri kemudian berpindah kembali ke Indonesia dan telah tinggal atau berniat tinggal selama 12 bulan atau lebih.

5.2 Arus Migrasi Internasional

Arus Migrasi Masuk Internasional (*Immigration*)

Tergantung pada kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan migrasi internasional, arus masuk migran internasional dapat mencakup semua orang kelahiran negara asing atau WNA yang berpindah tempat tinggal ke Indonesia dalam periode waktu tertentu untuk tinggal menetap di Indonesia. Selain itu, arus migrasi internasional juga dapat didefinisikan sebagai semua orang, baik WNI dan WNA, yang masuk ke Indonesia dan menjadi bagian dari penduduk Indonesia pada periode waktu tertentu.

- **Arus Migrasi Masuk WNI yang kembali dari luar negeri (Migrasi Kembali WNI)**

Merujuk pada jumlah WNI yang sebelumnya tinggal di luar negeri dan telah pindah kembali ke Indonesia pada tahun referensi tertentu.

- **Arus Migrasi Masuk Penduduk kelahiran Indonesia (Migrasi Kembali *Native-born*)**

Seluruh penduduk yang lahir di Indonesia tetapi pernah tinggal di luar negeri dan kembali menjadi penduduk Indonesia.

Arus Migrasi Keluar Internasional (*Emigration*)

Mengacu pada jumlah warga negara Indonesia yang meninggalkan Indonesia untuk bertempat tinggal tetap di negara lain selama periode waktu tertentu.

- **Arus migrasi keluar Pekerja Migran Indonesia/WNI untuk bekerja**

Arus keluar warga negara Indonesia untuk pekerjaan mencakup hanya warga negara yang meninggalkan Indonesia untuk tujuan pekerjaan, atau emigran “untuk pekerjaan”. Oleh karena itu, kelompok ini mengecualikan anggota keluarga yang mengikuti yang tujuan migrasinya bukan untuk bekerja pada saat masuk ke negara tujuan.

- **Arus migrasi keluar WNI untuk keperluan lainnya**

Arus migrasi keluar bagi WNI yang bertujuan selain bekerja diantaranya seperti, WNI pindah ke luar negeri karena pendidikan, tujuan keluarga (penyatuan keluarga) atau alasan lainnya. Contoh alasan lainnya, tingkat kriminalitas tinggi, bisnis, perkawinan, alasan kesehatan, dan pekerja di pertambangan (UNSD, 2017).

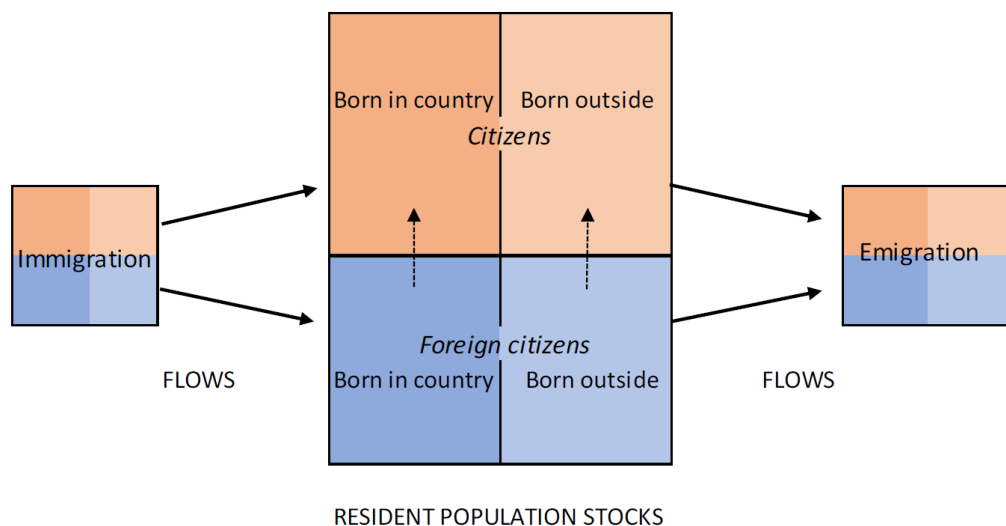
Migrasi keluar negeri pada pelajar mencakup mereka yang bermigrasi karena alasan pendidikan ke luar negara tempat tinggalnya minimal selama 12 bulan atau lebih (Spring, 2009). Konsep *international students* menurut Shapiro, Farrelly and Tomas (2014) merujuk pada pelajar yang berpindah ke luar negeri untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

- **Arus Migrasi Keluar WNA**

Arus migrasi keluar WNA juga dapat dicatat melalui data administratif dari kementerian/lembaga terkait menurut status kewarganegaraan dan izin tinggal yang digunakan selama di Indonesia.

Di Indonesia, izin tinggal terdiri atas tiga jenis, yaitu Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Identifikasi arus migrasi keluar dari WNA dapat dilihat melalui pendekatan mereka yang memiliki ITAS minimal 1 tahun atau pemegang ITAP yang melakukan migrasi keluar negeri. WNA yang memiliki ITK juga dapat diidentifikasi sebagai migran keluar apabila dilihat riwayat dari pengajuan ITK tersebut dengan syarat terdapat kunjungan yang berulang sehingga memenuhi konsep penduduk.

Gambar 3 memberikan informasi lebih rinci terkait hubungan antara stok migran dan arus migrasi yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Pada bagan tersebut penduduk dibagi dalam 2 kategori menurut tempat lahir dan kewarganegaraan dengan informasi arus migrasi masuk dan keluar. Kerangka konseptual ini mengindikasikan koherensi antara arus dan stok migran. Perubahan ukuran dan struktur stok migran ditentukan oleh arus migrasi.



Referensi: UN Expert Group on Migration Statistics (2021)

Gambar 3. Kerangka Konseptual Migrasi Internasional dan Hubungan Antara Arus dan Stok Migran

5.3 Cakupan Migrasi Internasional Lainnya

Selain stok dan arus migrasi, beberapa indikator berikut ini merupakan indikator yang datanya tersedia dan dimungkinkan dapat disajikan di Indonesia saat ini, yaitu mobilitas temporer internasional, pekerja lintas perbatasan, pencari suaka di negara transit, dan remitansi.

Mobilitas temporer internasional

Merujuk pada seluruh pergerakan antar batas negara tanpa ada perubahan tempat tinggal (*usual residence*).

Pekerja lintas perbatasan (*Cross border workers*)

Seluruh orang yang tidak tinggal di Indonesia, tetapi memiliki kegiatan ekonomi berlanjut (lebih dari satu kali setahun) dari negara yang memiliki perizinan lintas batas secara reguler dan periode terbatas (harian atau mingguan) ke Indonesia (*ILO Guidelines concerning statistics of international labour migration*, 2018).

Pencari suaka di negara transit (*Asylum seekers in transit*)

Seluruh individu yang melakukan perjalanan ke negara transit dengan tujuan untuk melanjutkan perjalanan ke negara selanjutnya dan mengajukan permohonan suaka di negara tersebut.

Kategori pekerja temporer lainnya

Seluruh individu yang bukan termasuk penduduk di Indonesia, tetapi melakukan perjalanan dalam periode waktu kurang dari 12 bulan untuk alasan terkait pekerjaan, seperti pekerja keliling dan pekerja yang terikat proyek (*itinerant workers and project-tied workers*).

Remitansi

Remitansi merupakan transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya. Indikator ini menjadi salah satu sumber dalam menggerakkan perekonomian di negara asal pekerja migran. Indikator ini dapat ditabulasikan menurut negara tempat kerja migran dan periode waktu tertentu (semesteran atau tahunan).

Indikator Biaya rekrutmen (RCI)

Indikator Biaya Rekrutmen atau *Recruitment Cost Indicator* (RCI) ini menjelaskan biaya yang dikeluarkan oleh pekerja migran yang meliputi biaya penyalur, biaya visa dan paspor, biaya transportasi, biaya asuransi/medis, biaya pelatihan, termasuk juga potongan dari gaji yang



diambil untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Biaya ini adalah perbandingan antara gaji bulanan yang diterima oleh pekerja migran untuk mendapatkan rasio antara biaya rekrutmen dengan gaji dalam sebulan. Selain itu, biaya rekrutmen juga dapat ditabulasikan dengan negara tujuan dan jenis pekerjaan.

6. Statistik Migrasi Tenaga Kerja Internasional (*International Labour Migrant Statistics*)

Perbedaan antara statistik migran internasional dan statistik migrasi tenaga kerja internasional adalah bahwa migrasi tenaga kerja internasional berisi informasi terkait status angkatan kerja di suatu negara. Status angkatan kerja (lihat penjelasan di bawah) terkait dengan keterikatan pada pasar tenaga kerja dan merupakan indikator penting untuk migrasi dan tata kelola migrasi tenaga kerja. Yang harus digarisbawahi bahwa pekerja migran internasional mencakup orang yang bekerja tetapi juga orang yang menganggur.

Panduan Statistik Migrasi Tenaga Kerja Internasional, ICLS ke-20

Panduan ICLS ke-20 berupaya mendukung negara-negara untuk mengembangkan statistik tentang migrasi tenaga kerja pada masing-masing negara, memberikan kerangka konseptual yang akan membantu mengatasi fragmentasi sumber statistik antar lembaga pemerintah, dan mendorong komparabilitas data-data tersebut secara nasional dan internasional.

Sebagaimana diuraikan dalam ICLS ke-20, seorang “pekerja migran” merupakan kombinasi dari dua konsep, konsep demografis (tempat kelahiran atau tempat tinggal sebelumnya, atau kewarganegaraan) yang berkaitan dengan bagian “migran” dari istilah tersebut, dan konsep sosial-ekonomi (kegiatan ekonomi) yang berhubungan dengan paruh “pekerja” dari istilah tersebut. Dalam hal ini, panduan tersebut membahas identifikasi lengkap atas apa yang biasa disebut “pekerja migran internasional” dan mengacu pada tiga konsep: (1) migran internasional untuk pekerjaan; (2) pekerja migran internasional yang pulang dan (3) pekerja migran internasional.

Guna mencakup secara luas pekerja migran internasional yang ada di suatu negara, Kantor Statistik Nasional perlu menetapkan di antara orang-orang yang tinggal di negara tersebut orang yang merupakan migran internasional (berdasarkan karakteristik demografis) serta bagian dari angkatan kerja (berdasarkan karakteristik pekerjaan). Selain itu, orang yang tidak bertempat tinggal tetap di suatu negara (lihat Gambar di bawah) tetapi termasuk dalam angkatan kerja atau calon angkatan kerja atau pekerjaan dalam bentuk lain harus dihitung. Ini meliputi orang-orang “misalnya pekerja perbatasan, pekerja musiman, pekerja keliling, pekerja migran berdokumen dan tidak berdokumen, pekerja terikat proyek, pekerja dengan pekerjaan tertentu, pelaut dan pekerja di instalasi lepas pantai” (ILO 2018, halaman 3).

Untuk informasi lebih rinci, konsep ini merujuk ke [Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization](#), yang diadopsi oleh International Conference of Labour Statisticians (ICLS) ke-19 (Oktober 2013).

6.3 Pengangguran

Penganggur terdiri dari semua orang dalam **usia kerja** yang ²:

- a) tidak memiliki pekerjaan selama periode acuan, yaitu tidak memiliki pekerjaan berbayar atau pekerjaan mandiri;
- b) saat ini tersedia untuk bekerja, yaitu tersedia untuk pekerjaan berbayar atau pekerjaan mandiri selama periode acuan; dan
- c) mencari pekerjaan, yaitu telah melakukan langkah-langkah tertentu dalam periode tertentu baru-baru ini untuk mencari pekerjaan berbayar atau pekerjaan mandiri.
- d) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai bekerja (Sakernas, Indonesia)

Untuk tujuan komparabilitas internasional, periode pencarian kerja seringkali didefinisikan sebagai empat minggu sebelumnya, tetapi hal ini bervariasi dari satu negara ke negara lain. Di Indonesia, variasi dari periode acuan ini harus dicatat dalam formulir penyerahan.

Langkah-langkah tertentu yang dilakukan untuk mencari pekerjaan dapat mencakup pendaftaran pada bursa kerja publik atau swasta; pengajuan lamaran ke pemberi kerja; pencarian di tempat kerja, peternakan, gerbang pabrik, pasar atau tempat orang berkumpul lainnya; memasang atau menjawab iklan surat kabar; meminta bantuan teman atau kerabat; mencari tanah, bangunan, mesin atau peralatan untuk mendirikan usaha sendiri; mengatur sumberdaya keuangan; dan mengajukan izin dan lisensi.

Meskipun rekomendasi ICLS ke-13 memungkinkan dalam beberapa kasus untuk menerapkan definisi yang longgar untuk pengangguran, resolusi yang diadopsi oleh ICLS ke-19 mendefinisikan orang yang tidak memiliki pekerjaan, saat ini tersedia dan menginginkan pekerjaan tetapi tidak melakukan kegiatan untuk mencari pekerjaan sebagai “calon pencari kerja yang tersedia” di dalam calon angkatan kerja. Dengan demikian, data tentang pengangguran yang diminta dalam kuesioner ini harus dirujuk, jika memungkinkan dan untuk tujuan komparabilitas internasional, ke definisi yang ketat untuk pengangguran (yaitu, orang yang memenuhi ketiga kriteria selama periode acuan), apa pun di luar definisi ini harus dicatat di dalam proses penyerahan.

Untuk informasi lebih rinci, dapat merujuk ke [Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization](#), yang diadopsi oleh ICLS ke-19 (Oktober 2013).

² Ini merupakan definisi pengangguran menurut panduan International Conference of Labour Statisticians (ICLS). Variasi definisi yang digunakan yang bergantung pada himpunan data harus dijelaskan di formulir penyerahan, di bagian ‘catatan’.

6.4 Status pekerjaan

Mengacu pada jenis kontrak kerja eksplisit atau implisit yang dimiliki oleh seseorang dengan orang atau organisasi lain. Kriteria dasar yang digunakan untuk menentukan kelompok status dalam pekerjaan adalah jenis risiko ekonomi dan jenis otoritas atas perusahaan dan pekerja lain yang dimiliki atau akan dimiliki oleh pemegang pekerjaan tersebut. Lihat bagian klasifikasi untuk rincinya.

Karyawan adalah semua pekerja yang memegang jenis pekerjaan yang didefinisikan sebagai “pekerjaan berbayar”. Pekerjaan berbayar adalah pekerjaan di mana pemegangnya memiliki kontrak kerja eksplisit atau implisit yang memberi mereka upah pokok yang tidak secara langsung bergantung pada pendapatan unit tempat mereka bekerja (unit ini dapat berupa korporasi, lembaga nirlaba, unit pemerintah atau rumah tangga). Orang-orang dalam “pekerjaan berbayar” biasanya dibayar dengan upah dan gaji, tetapi, bisa dibayar dengan komisi dari penjualan, dengan upah borongan, bonus atau pembayaran non-tunai misalnya makanan, tempat tinggal atau pelatihan.

Topik terpilah menurut status dalam pekerjaan harus diberikan sesuai dengan agregat status dalam klasifikasi pekerjaan. Kesesuaian antara kategori agregat dan versi terbaru *International Standard Classification of Status in Employment (ICSE-93)* ditunjukkan di bawah ini.

Tabel 13. Penyelarasan agregat status dalam pekerjaan dengan klasifikasi ICSE-93

Agregat status dalam pekerjaan	ICSE-93
Karyawan	Karyawan
Pekerja mandiri	- Karyawan - Pekerja mandiri - Anggota koperasi produsen - Anggota keluarga membantu
Pekerja yang tidak bisa diklasifikasi menurut status	Pekerja yang tidak bisa diklasifikasi menurut status

6.5 Kegiatan Ekonomi

Mengacu pada kegiatan utama perusahaan tempat seseorang bekerja selama periode acuan. Cabang kegiatan ekonomi seseorang tidak bergantung pada tugas atau fungsi tertentu dari pekerjaan orang tersebut, tetapi pada karakteristik unit ekonomi tempat orang tersebut berada. Lihat bagian klasifikasi untuk rincinya.

Topik terpilah menurut kegiatan ekonomi harus diberikan menurut klasifikasi kegiatan ekonomi agregat. Jika data yang relevan tidak dapat diberikan menurut klasifikasi tersebut, maka data harus diberi kode menurut kategori sektor besar. Kesesuaian antara kategori

agregat dan versi berurut *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC-Rev. 4)* ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 14. Kelompok Sektor Besar, Kegiatan Ekonomi Agregat dan Penyelesaian ISIC Rev. 4

Sektor besar	Agregat kegiatan ekonomi	Bagian ISIC Rev. 4
Pertanian	Pertanian	A
Industri	Manufaktur	C
	Konstruksi	F
	Pertambangan dan penggalian; Pasokan listrik, gas dan air	B, D, E
Jasa	Jasa Pasar (Perdagangan; transportasi; Akomodasi dan makanan; Jasa administrasi bisnis)	G, H, I, J, K L, M, N
	Jasa non-pasar (Administrasi publik; Layanan dan kegiatan masyarakat, sosial dan lainnya)	O, P, Q, R, S, T, U
Tidak bisa diklasifikasi menurut kegiatan ekonomi	Tidak bisa diklasifikasi menurut kegiatan ekonomi	0

6.6 Jabatan

Informasi tentang jabatan memberikan uraian serangkaian tugas dan kewajiban yang dilaksanakan oleh, atau dapat ditugaskan kepada, satu orang. Lihat bagian klasifikasi untuk rincinya.

Topik terpilah menurut jabatan harus diberikan menurut kategori agregat klasifikasi jabatan, yang sesuai dengan tingkat keterampilan. Kesesuaian antara kategori agregat dan versi berurut *International Standard Classification of Occupations (ISCO-88 dan ISCO-08)* ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 15. Kategori Jabatan Agregat dan Penyelarasan Dengan Klasifikasi ISCO-08 dan ISCO-88

Kategori jabatan agregat	ISCO-08	ISCO-88
Keterampilan tingkat 3 dan 4 (tinggi): Manajer, professional dan teknisi	1 Manajer	1 Legislator, pejabat senior dan manajer
	2 Profesional	2 Profesional
	3 Teknisi dan <i>associate</i> profesional	3 Teknisi dan <i>associate</i> profesional
Keterampilan tingkat 2 (sedang): Pegawai dan pekerja jasa, pertanian, perdagangan dan pabrik	4 Pekerja pendukung klerikal	4 Pegawai
	5 Pekerja jasa dan penjualan	5 Pekerja jasa dan pekerja penjualan toko dan pasar
	6 Pekerja pertanian, kehutanan dan perikanan terampil	6 Pekerja pertanian dan perikanan terampil
	7 Pekerja kerajinan dan perdagangan terkait	7 Pekerja kerajinan dan perdagangan terkait
	8 Operator pabrik dan mesin, dan perakitan	8 Operator pabrik dan mesin, dan perakitan
Keterampilan tingkat 1 (rendah): Jabatan dasar	9 Jabatan dasar	9 Jabatan dasar
Angkatan bersenjata dan tidak diklasifikasi di tempat lain	10 Jabatan angkatan bersenjata	10 Angkatan bersenjata
	X Tidak diklasifikasi di tempat lain	X Tidak diklasifikasi di tempat lain

6.7 Gaji/Upah/Penghasilan

Mengacu pada upah kotor (total sebelum pemotongan dilakukan oleh pemberi kerja) tunai dan non-tunai yang dibayarkan kepada karyawan, lazimnya secara berkala, untuk waktu bekerja yang dijalani atau pekerjaan yang dilaksanakan bersama dengan upah untuk waktu kerja yang tidak dijalani, misalnya liburan tahunan, jenis cuti berbayar lain atau libur hari besar. Data penghasilan harus disajikan, jika memungkinkan, dalam bentuk nominal (tidak disesuaikan karena inflasi) dan berdasarkan rata-rata penghasilan bulanan semua karyawan. Untuk informasi lebih rinci, dapat dilihat pada [Resolution concerning an integrated system of wages statistics](#), yang diadopsi oleh Konferensi Internasional Ahli Statistik Tenaga Kerja Kedua Belas (Oktober 1973).

7. Pemilahan Data

Data tentang jumlah maupun persentase migran akan menjadi lebih bermanfaat apabila memuat informasi yang spesifik baik dari sisi karakteristik maupun kewilayahan. Informasi tersebut digunakan untuk analisis dan perencanaan kebijakan. Semua data harus dilengkapi dengan perincian menurut jenis kelamin (lihat Kotak 4) dan usia, bila memungkinkan.

7.1 Usia

Untuk keperluan statistik, penduduk usia kerja terdiri dari semua orang di atas ambang usia minimum tertentu yang diajukan pertanyaan tentang kegiatan ekonomi. Untuk tujuan komparabilitas internasional, penduduk usia kerja umumnya didefinisikan sebagai orang berusia 15 tahun ke atas, tetapi ini berbeda di setiap negara. Selain menggunakan ambang usia minimum, negara-negara tertentu juga menerapkan batas usia maksimum, di mana orang-orang di luar usia tersebut tidak dimasukkan dalam hitungan penduduk usia kerja.

Pada publikasi BPS, umur dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan: 5-9, 10-14, 15-19, ..., 75+. Sejalan dengan itu, UNSD merekomendasikan penggunaan kelompok umur lima tahunan pada tabulasi dengan rekomendasi kategori terakhir merupakan interval terbuka seperti 75+ atau 85+. Untuk kebutuhan analisis migrasi, migran secara umum dapat didefinisikan sebagai penduduk usia 5 tahun ke atas. Sementara itu, jika terkait dengan ketenagakerjaan, penduduk migran mencakup usia 15 tahun ke atas. Untuk ILMS, data yang dikumpulkan menurut usia diberikan menurut kelompok usia agregat: 15-24, 25-54, 55-64 dan 65+.

7.2 Jenis Kelamin

Sebagian besar informasi yang diminta harus dipilah menurut jenis kelamin, yaitu untuk laki-laki dan perempuan secara terpisah, selain secara total.

Pentingnya data migrasi tenaga kerja yang terpilah menurut jenis kelamin

Tata kelola dan pengambilan kebijakan migrasi tenaga kerja yang tepat yang secara memadai menangani pekerja migran perempuan hanya dapat dicapai dengan analisis secara gender atas data ILMS sebuah negara. Analisis gender penting untuk memastikan bahasa, undang-undang, kebijakan, dan layanan menanggapi kebutuhan kelompok laki-laki, perempuan, dan kelompok lainnya. Kurangnya pemahaman menghasilkan kebijakan berwawasan sempit terkait perempuan misalnya larangan dan pembatasan usia yang dapat memperparah risiko. Dimensi gender dalam analisis data ILMS juga penting untuk penganggaran gender, termasuk alokasi, penggunaan dan pemantauan, misalnya, untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan dukungan yang sesuai untuk penyintas kekerasan terhadap perempuan. Penting juga untuk memfasilitasi akses pekerja migran perempuan ke sumberdaya, yang dengan sendirinya terkait dengan pengurangan ongkos dan biaya yang terkait dengan migrasi.

Informasi lebih lanjut: ILO (2020).

7.3 Pendidikan

Mengacu pada tingkat pendidikan tertinggi yang diselesaikan. Data menurut tingkat pendidikan diberikan pada tingkat pendidikan tertinggi yang diselesaikan, yang diklasifikasikan menurut agregat tingkat pendidikan berdasarkan *International Standard Classification of Education (ISCED-11)* terbaru sebagaimana ditunjukkan di bawah ini.

Tabel 16. Kategori Jabatan Agregat dan Penyelarasan Dengan Klasifikasi ISCO-08 dan ISCO-88

Agregat tingkat pendidikan	ISCED-11 (1 digit)	ISCED-11 (2-digit)
Di bawah dasar	X. Tidak bersekolah	
	0 Pendidikan Anak Usia Dini	01 Pengembangan pendidikan anak usia dini
		02 Pra-pendidikan dasar
Dasar	1 Pendidikan Dasar	10 Pendidikan Dasar
	2 Pendidikan Menengah Tingkat Pertama	24 Umum
		25 Vokasi
Menengah	3 Pendidikan Menengah Tingkat Atas	34 Umum
		35 Vokasi
	4 Pendidikan pasca menengah bukan pendidikan tinggi	44 Umum
Tinggi		45 Vokasi
	5 Pendidikan tingkat diploma	54 Umum
		55 Vokasi
	6 Tingkat sarjana atau sederajat	64 Akademik
		65 Profesional
		66 Orientasi tidak ditentukan
	7 Tingkat magister atau sederajat	74 Akademik
		75 Profesional
		76 Orientasi tidak ditentukan
	8 Tingkat doktor atau sederajat	84 Akademik
		85 Profesional
		86 Orientasi tidak ditentukan
Tingkat tidak disebutkan	9. Tidak diklasifikasikan di tempat lain	



Sementara itu, menurut UNSD (2017), kategori pendidikan dibagi menjadi kategori: Tidak/belum bersekolah, Pendidikan prasekolah (seperti: TK/PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan lanjut/vokasi. Selain itu, BPS mengkategorikan tingkat pendidikan dalam beberapa jenjang yaitu belum/tidak pernah bersekolah, belum/ tidak tamat SD/SDLB/MI/Paket A, SD/SDLB/MI/Paket A, SMP/SMPLB/MTs/Paket B, SMA/SMLB/MA/SMK/MAK/Paket C, DI/DII/DIII, DIV/S1, Profesi, dan S2/S3.

7.4 Wilayah

Data migrasi internasional dapat dipilah menurut aspek wilayah. Perspektif migrasi masuk dapat dilihat menurut negara asal migran. Pembagian menurut negara asal berguna untuk mengidentifikasi negara pengirim migran di suatu wilayah. Jika melihat dari aspek migrasi keluar, tabulasi wilayah dapat menggambarkan secara spesifik wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang berkontribusi dalam pengiriman migran ke luar negeri. Kode negara dan kewarganegaraan bersumber pada *Standard Country or Area Codes for Statistical Use (M49) United Nations Statistics Division (UNSD)*. Kode terdiri dari 4 digit, 1 digit pertama menunjukkan kode luar negeri dan 3 digit berikutnya menunjukkan urutan negara. Sementara itu, Kode wilayah kabupaten/kota bersumber pada kode wilayah pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.

DAFTAR PUSTAKA

- ILO (2018) *Guidelines Concerning Statistics of International Labour Migration, 20th International Conference of Labour Statisticians*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648922.pdf
- ILO (2020). Making women migrant workers count. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_773226.pdf
- ILO (2021) *Guide to reporting International Labour Migration Statistics to the ILO using the Excel questionnaire ILO*. https://www.ilo.org/ilostat-files/xQ/ILMS/docs/ILOxOguide_EN.pdf
- ILO (2022) Measuring labour migration in ASEAN: Analysis from the ILO's International Labour Migration Statistics (ILMS) Database.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. https://www.bps.go.id/website/fileMenu/Salinan_BPS%205_Metadata.pdf
- Spring, J. 2009, *Globalization of Education: An Introduction*, QueensCollege & Graduate Centre, City University of New York
- Shapiro, S., Farrelly, R., & Tomas, Z. (2014). *Fostering international student success in higher education*. Alexandria: TESOL Press
- UN Expert Group on Migration Statistics Task Force 2 (2021) *Final Report on Conceptual frameworks and Concepts and Definitions on International Migration* <https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/task-forces/TF2-ConceptualFramework-Final.pdf>
- United Nations (2017) *Principles and recommendations for population and housing censuses, Revision 3*. ST/ESA/STAT/SER.M/67/Rev.3, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, United Nations, New York. Available at: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67Rev3en.pdf.
- United Nations (1998) *Recommendations on statistics of international migration, Revision 1. Series M, No. 58, Rev. 1*, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, United Nations, New York. Available at https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_58rev1e.pdf.

Lampiran 1. Standar Data Statistik terkait SDMI

Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
			Penyajian	Isian		
Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI)	Warga Negara Indonesia (WNI)	Banyaknya orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia baik dalam rangka kunjungan sementara atau menetap.	Wilayah; Negara; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan ; Tujuan Menetap WNI	-	Total	orang
Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)	Badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.	Wilayah;	-	Total	Perusahaan
Proporsi Volume Remitansi Pekerja Migran Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	Remitansi; Pekerja Migran Indonesia; Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI); Produk Domestik Bruto (PDB)	Perbandingan remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam US dollars terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dinyatakan dalam persen.	Wilayah;	-	Persentase	Persen
Jumlah Mantan Rumah	Anggota Rumah	Banyaknya penduduk yang	Wilayah; Jenis Kelamin;	-	Total	orang

Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
			Penyajian	Isian		
Anggota Rumah Tangga yang Melakukan Migrasi Keluar Internasional	Tangga; Migrasi Internasional	melakukan migrasi keluar internasional di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.	Umur/Usia; Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan ; Alasan Utama Pindah dari Tempat Tinggal Sebelumnya			
Jumlah Penduduk	Penduduk	Jumlah orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.	Wilayah; Klasifikasi Wilayah; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Status Kewarganegaraan	-	Total	orang
Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang Terdaftar Lapor Diri	Warga Negara Indonesia (WNI); Lapor Diri Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri	Banyaknya Warga Negara Indonesia yang telah melakukan lapor diri kepada Perwakilan RI sesuai dengan wilayah domisilinya di luar negeri, dan berada di luar negeri pada suatu titik waktu tertentu.	Wilayah; Negara; Umur/Usia; Tujuan Menetap WNI	-	Total	orang
Wilayah	Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik	Letak geografis yang mengacu pada sistem pengkodean wilayah kerja statistik	-	Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik	-	-
Klasifikasi Wilayah	Perkotaan; Perdesaan	Golongan suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang ditentukan berdasarkan standar	-	1. Perkotaan 2. Perdesaan	-	-

Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
			Penyajian	Isian		
		atau ciri wilayah perkotaan dan perdesaan.				
Negara	Negara	Nama negara atau wilayah beserta kode numerik tiga digit yang digunakan untuk keperluan pemrosesan statistik oleh Divisi Statistik Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kode alfabet tiga digit yang ditetapkan oleh International Organization for Standardization (ISO).	-	M49 atau ISO 3166	-	-
Status Kewarganegaraan	Kewarganegaraan	Kedudukan seorang warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	-	1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Warga Negara Asing (WNA)	-	-
Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	-	1. laki-laki 2. perempuan	-	-

Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
			Penyajian	Isian		
Umur/Usia	Umur/Usia	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. Dalam pengumpulan data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, sedangkan untuk penyajian data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, kelompok umur 5 tahunan, kelompok umur 10 tahunan, dan/atau kelompok umur dependensi.	-	0A. 0-14 tahun 0T. 0-4 tahun 00. 0 tahun 01. 1 tahun 02. 2 tahun 03. 3 tahun 04. 4 tahun 0B. 5-14 tahun 0D. 5-9 tahun 05. 5 tahun 06. 6 tahun 07. 7 tahun 08. 8 tahun 09. 9 tahun 1C. 10-14 tahun 10. 10 tahun 11. 11 tahun 12. 12 tahun 13. 13 tahun 14. 14 tahun 1A. 15-64 tahun 1B. 15-24 tahun 1D. 15-19 tahun 15. 15 tahun 16. 16 tahun 17. 17 tahun 18. 18 tahun 19. 19 tahun 2C. 20-24 tahun 20. 20 tahun 21. 21 tahun 22. 22 tahun 23. 23 tahun 24. 24 tahun 2B. 25-34 tahun 2D. 25-29 tahun 25. 25 tahun 26. 26 tahun 27. 27 tahun 28. 28 tahun 29. 29 tahun 3C. 30-34 tahun 30. 30 tahun 31. 31 tahun 32. 32 tahun 33. 33 tahun 34. 34 tahun 3B. 35-44 tahun	-	-

Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
			Penyajian	Isian		
				3D. 35-39 tahun		
				35. 35 tahun		
				36. 36 tahun		
				37. 37 tahun		
				38. 38 tahun		
				39. 39 tahun		
				4C. 40-44 tahun		
				40. 40 tahun		
				41. 41 tahun		
				42. 42 tahun		
				43. 43 tahun		
				44. 44 tahun		
				4B. 45-54 tahun		
				4D. 45-49 tahun		
				45. 45 tahun		
				46. 46 tahun		
				47. 47 tahun		
				48. 48 tahun		
				49. 49 tahun		
				5C. 50-54 tahun		
				50. 50 tahun		
				51. 51 tahun		
				52. 52 tahun		
				53. 53 tahun		
				54. 54 tahun		
				5B. 55-64 tahun		
				5D. 55-59 tahun		
				55. 55 tahun		
				56. 56 tahun		
				57. 57 tahun		
				58. 58 tahun		
				59. 59 tahun		
				6C. 60-64 tahun		
				60. 60 tahun		
				61. 61 tahun		
				62. 62 tahun		
				63. 63 tahun		
				64. 64 tahun		
				6A. 65+ tahun		
				6B. 65-74 tahun		
				6D. 65-79 tahun		
				65. 65 tahun		
				66. 66 tahun		
				67. 67 tahun		
				68. 68 tahun		
				69. 69 tahun		
				7C. 70-74 tahun		
				70. 70 tahun		

Nama Data	Konsep	Definisi		Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
					71. 71 tahun		
					72. 72 tahun		
					73. 73 tahun		
					74. 74 tahun		
					7T. 75+ tahun		
					7B. 75-84 tahun		
					7D. 75-79 tahun		
					75. 75 tahun		
					76. 76 tahun		
					77. 77 tahun		
					78. 78 tahun		
					79. 79 tahun		
					8C. 80-84 tahun		
					80. 80 tahun		
					81. 81 tahun		
					82. 82 tahun		
					83. 83 tahun		
					84. 84 tahun		
					8T. 85+ tahun		
					8B. 85-94 tahun		
					8D. 85-89 tahun		
					85. 85 tahun		
					86. 86 tahun		
					87. 87 tahun		
					88. 88 tahun		
					89. 89 tahun		
					9C. 90-94 tahun		
					90. 90 tahun		
					91. 91 tahun		
					92. 92 tahun		
					93. 93 tahun		
					94. 94 tahun		
					9T. 95+ tahun		
					95. 95 tahun		
					96. 96 tahun		
					97. 97+ tahun		
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Jenjang Pendidikan	Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi	-		0. Tidak pernah bersekolah 1. Tidak Tamat SD	-	-

Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
			Penyajian	Isian	
		pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).		2. Tamat SD/MI/Sederajat 3. Tamat SMP/MTs/Sederajat 4. Tamat SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat 5. Tamat S1/DIV 6. Tamat S2 7. Tamat S3	
Tujuan Menetap WNI	Warga Negara Indonesia (WNI)	Alasan atau hal yang mendorong seseorang bertempat tinggal menetap di suatu wilayah.	-	1. Mendampingi suami/istri; 2. Anggota keluarga/pengikut; 3. Bekerja 4. Belajar; 5. Magang 6. Lain-lain.	-
Alasan Utama Pindah dari Tempat Tinggal Sebelumnya	Migrasi	Merupakan pengelompokan alasan utama seseorang pindah dari tempat tinggal terakhir ke tempat tinggal sekarang.	-	1. Pekerjaan 2. Pendidikan 3. Ikut Suami/Istri/Orang Tua/Anak 4. Ikut Saudara Kandung/Famili Lain 5. Lainnya	-

Lampiran 2. Konsep dan Definisi Baku terkait SDMI

Konsep	Definisi
Warga Negara Indonesia (WNI)	Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
Warga Negara Asing (WNA)	Orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan selain WNI. Asal negara yang ditulis adalah nama negara sesuai kewarganegaraannya. Misalnya, jika aslinya adalah keturunan Tionghoa (China) tetapi yang bersangkutan berkewarganegaraan India, maka yang ditulis adalah INDIA.
Pengungsi Internasional	Orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)	Badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Remitansi	Transfer uang yang dilakukan oleh pekerja asing (migran) ke penerima negara asalnya.
Produk Domestik Bruto (PDB)	Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Bruto (PDB) merefleksikan total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun).
Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
Penduduk	Semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, dan dalam satu pengelolaan makan sehari-hari, walaupun sementara sedang tidak berada di tempat dalam jangka waktu kurang dari satu tahun
Anggota Rumah Tangga	Semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, dan dalam satu pengelolaan makan sehari-hari, walaupun sementara sedang tidak berada di tempat dalam jangka waktu kurang dari satu tahun
Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Transfer dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tinggal di luar negeri selama satu tahun atau lebih kepada keluarga di Indonesia.

Konsep	Definisi
Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan pekerja migran Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan.
Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik	Identitas wilayah kerja statistik yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan blok sensus. Kode dan nama wilayah kerja statistik ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Wilayah Kerja Statistik yang terbit setiap tahun.
Perkotaan	Status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi desa perkotaan.
Perdesaan	Status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi desa perkotaan.
Negara	1. Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. 2. Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya
Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
Umur/Usia	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
Jenjang Pendidikan	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
Migrasi	Perpindahan penduduk dari satu tempat (negara dan sebagainya) ke tempat (negara dan sebagainya) lain untuk menetap.
Kewarganegaraan	Segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.